

POLITIK LUAR NEGERI JEPANG TERHADAP ASEAN

OLEH :

1. ABUL NIZAM AL-ZANZAMI 201310360311111
2. CAHAYA SEPTIADI RAHMAN 201310360311066

Dosen Pembimbing : Gonda Yumitro
Mata Kuliah : Teori Hubungan Internasional

Abstrack :

Perubahan konsep dan orientasi politik luar negeri Jepang tidak terlepas dari dinamika politik internasional pada Perang Dunia II yang mana militer menjadi focus utama arah politik luar negeri Jepang yang kemudian membawa pada kehancuran ekonomi Jepang pada berakhirnya Perang Dunia II dan juga tanggapan-tanggapan dari negara-negara Asia pada umumnya Asia tenggara (ASEAN) khususnya mengenai kekejaman Jepang pada Perang Dunia II. Perubahan orientasi politik luar negeri Jepang dari militer menuju ke peningkatan dan pembangunan ekonomi Jepang merupakan doktrin yang datang dari pemikiran-pemikiran dasar dari para pemimpin Jepang itu sendiri yang kemudian diejawantahkan pada kebijakan luar negeri Jepang yang tidak lagi berfokus pada militer namun lebih kepada ekonomi. Perubahan orientasi ini juga yang kemudian mempengaruhi politik luar negeri Jepang terhadap ASEAN yang mana dilihat dari kebijakan luar negeri Jepang dengan pembentukan ASEAN-Japan forum pada 1997 hingga ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) pada 5 November 2012 di Phnom Penh. Hasil yang kemudian dicapai oleh Jepang dan ASEAN sangat begitu signifikan baik dari aspek perdagangan maupun investasi

Keyword : Politik Luar Negeri Jepang, ASEAN-Japan Forum, AJCEP, Perdagangan, Investasi

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sangat sulit melepaskan ingatan Jepang selaku penjajah dalam pikiran orang Asia Tenggara hingga saat ini. Bahkan era penjajahan Jepang masih meninggalkan sisanya dalam bentuk tuntutan wanita-wanita Asia Tenggara yang dijadikan sebagai penghibur (*jugun ianfu*) di masa pendudukan Jepang. Di samping itu, orang-orang Asia Tenggara sempat mengalami masa penjajahan Jepang nyaris tidak mungkin melupakan penderitaan mereka saat berada dalam penjajahan Jepang yang sangat demikian brutal. (Cipto 2010)

Oleh karena itu, Jepang adalah salah satu negara yang sangat berkesan dan tidak dapat dilupakan bagi hampir seluruh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kesan yang kemudian menjadi ingatan sejarah bagi hampir seluruh negara-negara di kawasan Asia Tenggara yakni Jepang dianggap sebagai saudara tua dari negara-negara di kawasan Asia pada umumnya dan juga negara penjajah yang paling kejam dibandingkan dengan negara-negara colonial lain yang melakukan aktivitas kolonial di kawasan Asia Tenggara.

Perilaku kejam yang dilakukan oleh Jepang pada PD II bukan saja dirasakan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara, bahkan Cina dan Korea pun merasakan hal serupa. Kunjungan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Jepang ke kuil Yasukuni mendapat protes keras dari masyarakat Cina dan Korea Selatan yang menganggap kunjungan tersebut merupakan kunjungan untuk memuliakan “*Sejarah Agresi Militer*” Jepang.

Melansir berita *RepublikaOnline.com* pada Kamis 26 Desember 2013. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina di Beijing Qin Gang mengatakan “*kami sangat memprotes dan mengutuk keras tindakan yang pemimpin Jepang itu, Inti dari kunjungan pemimpin Jepang ke kuil Yasukuni adalah mempercantik sejarah agresi militer Jepang dan pemerintahan kolonial*”. Sebagaimana yang telah banyak diketahui bahwasanya kuil Yasukuni merupakan wilayah persengketaan antara Jepang, Cina dan Korea. Menurut Jepang kuil Yasukuni merupakan monument bersejarah sebagai penghormatan kepada para pahlawan yang menjadi korban dari “*Agresi Militer*” Jepang, sedangkan menurut Cina dan Korea kuil Yasukuni merupakan

monument yang menjadi bukti dari kekejaman Jepang pada PD II yang memakan korban warga Cina dan Korea.

Dari berbagai tanggapan di atas ini yang kemudian telah sampai pada persepsi umum bahwasanya Jepang merupakan negara yang sangat tidak bermoral dan sulit untuk dimaafkan karena kekejaman yang dilakukan pada masa PD II. Walaupun pemerintah Jepang selalu berusaha untuk menghapus persepsi tersebut dengan berbagai cara, antara lain dengan tetap mentaati konstitusi yang melarang Jepang mempersenjatai diri. (Cipto 2010)

Dengan upaya tidak mempersenjatai diri ini yang kemudian membuat konsepsi politik luar negeri dari Jepang berubah yang tidak lagi di bidang militer namun lebih memfokuskan pada peningkatan di bidang ekonomi yakni peningkatan perdagangan dan investasi terhadap ASEAN yang merupakan dasar doktrin yang datang dari pemikiran dasar para Perdana Menteri Jepang itu sendiri.

RUMUSAN MASALAH :

Berkaitan dengan judul dan latar belakang masalah, maka penulis membatasi masalah pada beberapa pertanyaan. Sebagai berikut :

1. Bagaimana konsepsi politik luar negeri Jepang terhadap ASEAN pasca Perang Dunia II?
2. Apa saja kebijakan luar negeri Jepang terhadap perdagangan dan investasi di ASEAN pasca Perang Dunia II?

PEMBAHASAN

1. POLITIK LUAR NEGERI JEPANG TERHADAP ASEAN PASCA PERANG DUNIA II

Politik luar negeri suatu negara pada hakikatnya merupakan hasil dari perpaduan dan refleksi dari kondisi dalam negeri yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi internasional. Demikian pula politik luar negeri Jepang. Sebagaimana yang sedikit sudah dijelaskan di atas pada bagian pendahuluan perubahan konsepsi politik luar negeri Jepang didasari pada akibat dari kekalahan agresi militer Jepang pada Perang Dunia II.

Pengalaman sejarah kelam Jepang ini yang kemudian dipake oleh para pemimpin Jepang dalam membuat konsepsi Politik Luar Negeri dari Jepang. Perubahan politik luar negeri Jepang tidak lagi memfokuskan pada peningkatan di bidang militer namun lebih memfokuskan pada peningkatan di bidang ekonomi dengan adanya berbagai doktrin-doktrin dari para pemimpin Jepang setelah Perang Dunia II diantaranya adalah Doktrin Yoshida, Doktrin Fukuda dan Doktrin Miyazawa.

Sejak empat puluh tahun pertama sejak bom atom dijatuhkan ke Nagasaki dan Hiroshima politik luar negeri Jepang ditentukan secara langsung dan tidak langsung oleh pemikiran pemikiran dasar dari Perdana Menteri Shigeru Yoshida. Pengalaman perang melawan sekutu juga membuat Yoshida sangat berhati dalam dalam menetapkan prioritas politik luar negerinya. Hal ini dibuktikan dengan penolakan dari Jepang atas ajakan Amerika untuk ikut serta dalam perjanjian keamanan kolektif pada Perang Dingin karena tidak sesuai dengan tema sentral politik luar negeri Jepang di bawah kepemimpinan Yoshida yang terfokus pada pembangunan ekonomi dalam negeri sehingga pemberlakuan pasal 9 konstitusi (*melarang Jepang menjadikan perang sebagai politik luar negerinya*) Jepang yang kemudian dipake oleh Yoshida untuk menolak semua tindakan yang mengarahkan Jepang pada tindakan politik luar negerinya yang berunsur militer. Sikap keras yang dilakukan oleh Yoshida pada Perang Dingin ini kemudian membuahkan hasil. Secara politik Jepang memasuki masa stabilitas yang sangat mendukung pembangunan ekonomi. Secara ekonomis Jepang juga akhirnya tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang setara dengan perekonomian Barat. (Cipto 2010)

Doktrin yoshida, secara umum merupakan perbaikan dan pembangunan ekonomi sebagai tema sentral dalam menjalankan misi politik luar negeri dari Jepang itu sendiri. Kehancuran Jepang pada masa Perang Dunia II menjadikan urusan pembangunan ekonomi menempati urutan pertama dalam pemikiran para pengambil keputusan luar negeri Jepang.

Sepanjang dekade 50-an hingga 60-an Jepang mulai mengalirkan bantuan ekonominya ke Asia Tenggara sekaligus juga upaya untuk memberikan kompensasi bagi negara-negara jajahannya di Asia Tenggara dan Jepang ingin menjadikan Asia Tenggara sebagai salah satu pasar bagi ekspor barang-barang yang diproduksinya sendiri disesuaikan dengan kebutuhan strategi ekspornya. Mengingat negara-negara di kawasan Asia Tenggara merupakan negara-negara miskin yang menjadi basis pasar Jepang dikarenakan jumlah penduduk yang banyak. Selain itu peningkatan hubungan Jepang dan negara-negara di Asia Tenggara menjadi bagian utama untuk menjalankan industry-industri dalam negeri Jepang itu sendiri, sebagai contoh seperti yang disampaikan Cipto (2010) *“meningkatnya kebutuhan Jepang akan energy, baik minyak maupun gas alam, membuat hubungan Jepang dan Indonesia semakin kuat. Indonesia menjamin kebutuhan energy Jepang dan otomatis mendapatkan lebih banyak bantuan luar negeri dibanding negara lain di Asia Tenggara”*.

Akat tetapi, bantuan yang kemudian diberikan oleh negara-negara Asia Tenggara seperti halnya Indonesia tidak berbanding lurus dengan apa yang kemudian diberikan oleh Jepang sehingga menimbulkan pergolakan politik yang bisa dikatakan sangat panas yakni dengan munculnya berbagai demonstran anti-Jepang. Salah satunya ada di Jakarta.

Bukan pengambil kebijakan namanya kalau tidak belajar dari pengalaman masa lalu. Begitu pula Jepang dengan melihat pergolakan politik yang kian memanas ini yang kemudian membuat Perdana Menteri Jepang pada saat itu Takeo Fukuda untuk memperbaiki hubungan dengan ASEAN, seiring dengan adanya kejatuhan Amerika di Vietnam.

Fukuda melancarkan *heart-to-heart diplomacy* (Doktrin Fukuda) untuk kembali memperkuat hubungan Jepang dengan ASEAN. Tentu bukan tidak mungkin untuk menarik ASEAN sudah pasti harus ada tawaran yang kemudian diberikan lagi kepada ASEAN yakni bantuan sebanyak satu juta dolar Amerika yang kemudian hubungan ASEAN dan Jepang

kembali terjalin erat. Mengingat ASEAN pada saat itu juga membutuhkan kekuatan sebagai pelindung setelah kehancuran Amerika di Vietnam. (Cipto 2010)

Disamping peningkatan dan pembangun ekonomi Jepang setelah Perang Dingin sebagaimana yang menjadi prioritas politik luar negeri Jepang pada masa kepemimpinan Yoshida sebagai doktrinnya, namun pada doktrin yang dilakukan oleh Fukuda pada masa kepemimpinnya bukan saja berfokus pada peningkatan dan pembangunan ekonomi namun juga pada peningkatan hubungan diplomatic antara Jepang dan negara-negara ASEAN.

Sedangkan untuk doktrin miyazawa sendiri, secara umum bukan cuman memfokuskan pada prioritas pembangunan ekonomi namun jauh lebih kompleks yakni juga menyangkut dengan keamanan di kawasan Asia pada umumnya dan Asia Tenggara khususnya. Sebagaimana sejak diadakanya kerja sama yang dilakukan Jepang dan Asia Tenggara, jepang mempunyai tanggung jawab penuh sebagai kekuatan baru untuk melindungi Asia Tenggara selepas perginya Amerika, bukan hanya berfokus pada peningkatan dan pembangunan ekonomi namun juga mengenai keamanan.

Doktrin miyazawa ini sebenarnya datang dari dalam public Jepang itu sendiri kemudian dipraktekan oleh Perdana Menteri Jepang saat itu yakni Kiichi Miyazawa pada pertemuan di *ASEAN Regional Forum* (ARF). Shinto Ishihara, mantan anggota Parlemen Jepang dan walikota Tokyo pada tahun 1999 hingga 2012 menyatakan bahawa “*Jepang harus mulai meningkatkan tanggung jawabnya untuk mengembangkan kawasan di Asia pada umumnya*”. Sedangkan menurut Kazuo Ogura, duta Jepang di Korea pada tahun 1993 bahwasanya “*Jepang dan Asia dapat bekerja sama menciptakan teori Kapitalise Asia*”. Kedua pernyataan ini dilatar belakangi perbedaan persepsi antara Amerika dan Jepang yang menimbulkan pertikain perdagangan oleh kritikan setelah berakhirnya perang dingin yang dilakukan Amerika terhadap Jepang yang seharusnya tidak sekedar membantu Amerika dengan “*check book diplomacy*”. Pandangan lain datang dari seorang ilmuwan social terkemuka yang dikenal sebagai “Max Webber”nya Jepang, Yasuke Murakami yang mengatakan bahwasanya “*Amerika sedang memasuki senja sejarahnya. Menurut Murakami, kebangkrutan tradisi pemikiran barat ini menjadi jelas sejalan dengan kuatnya tradisi pemikiran jepang yang tidak sepenuhnya berakar pada pemikiran barat*”. (Cipto 2010)

Gelombang pro-Asia dari kalangan intelektual ini yang kemudian menjadi dasar bagi doktrin yang dilakukan oleh Perdana Menteri Jepang Kiichi Miyazawa untuk membaicarkan hal yang lebih serius mengenai isu-isu keamanan yang kemudian dibangun melalui dialog di ARF yang dilakukan oleh ASEAN dengan mitra dialognya antara Jepang, Cina dan Korea Selatan. Akan tetapi bukan berarti Jepang menghapus Amerika dalam konsepsi keamanan yang dibangun melalui dialog di ARF namun tetap memasukan Amerika didalamnya karena pengalaman Jepang di masa lalu.

2. KEBIJAKAN LUAR NEGERI JEPANG TERHADAP PERDAGANGAN DAN INVESTASI DI ASEAN PASCA PERANG DUNIA II

Apa itu kebijakan luar negeri? Sejak dulu gagasan mengenai kebijakan luar negeri mengacu pada bagaimana sebuah negara berinteraksi dengan aktor-aktor global lainnya, namun definisi ini memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam dunia yang kompleks saat ini. Bahkan kini tidak ada definisi tunggal dari kebijakan luar negeri.

Seperti yang diungkapkan oleh Mansbach dan Rafferty (2012) Sebagian pengamat mengkonsepsikan kebijakan luar negeri sebagai *sebuah sistem kelembagaan dan tindakan dan tindakan tindakan yang kompleks yang bertujuan untuk mengubah perilaku negara-negara dan membiarkan negara mereka sendiri beradaptasi dengan lingkungan global*. Berdasarkan penjelasan ini maka dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan luar negeri menyangkut dengan konvensi input dan output yang terjadi akibat dari ada faktor yang membentuk tindakan suatu negara.

Dengan kata lain dalam hal ini kebijakan luar negeri yang di buat oleh Jepang terhadap ASEAN dalam tidak terlepas dari dinamika politik luar negeri ASEAN pasca Perang Dunia II dipengaruhi oleh kekalahan militer Jepang dari sekutu Amerika pada Perang Dunia II yang tidak lagi memfokuskan pada peningkatan militer namun lebih memfokuskan pada peningkatan dan pembangunan ekonomi. Sebagaimana yang telah sedikit banyak dijelaskan dibagian pembahasan pertama mengenai konsepsi politik luar negeri Jepang yang berorientasi pada bidang ekonomi sebagai hasil dari pemikiran dasar para pemimpin Jepang dengan doktrin-doktrin seperti doktrin Yoshida, doktrin Fukuda dan doktrin Miyazawa maka pada bagian pembahasan ini lebih

mengarah pada kebijakan luar negeri yang diambil oleh Jepang terhadap ASEAN pasca Perang Dunia II dari aspek perdagangan dan investasi.

Hal tersebut dapat dilihat dari dua hal. Pertama, kebijakan-kebijakan Perdana Menteri Jepang terhadap ASEAN yang banyak menekankan demiliterisasi Jepang. Sebagai contoh yaitu pidato dari Perdana Menteri Suzuki Zenko pada Januari 1981 di Bangkok. Dalam pidatonya, Suzuki menyampaikan bahwa Jepang tidak akan memainkan peran dalam militer di dunia internasional. Kedua, Forum ASEAN-Jepang yang pertama pada tahun 1977 sampai dengan yang ke-12 tahun 1990. Pada Forum ASEAN-Jepang yang pertama sampai dengan yang ke-12 tersebut. Fokus kerjasama keduanya adalah pada bidang ekonomi, perdagangan dan investasi.

Dari aspek perdangan, pada dasarnya blok perdagangan mempunyai beberapa hal yang harus diperhatikan oleh negara-negara yang mengadakan kerja sama sehingga kerja sama yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi negara-negara yang melakukan kerja sama pada aspek perdagangan, antara lain sebagaimana yang dikemukakan Afadlal et al. (2011) : (1) pada blok perdagangan, perdagangan akan menciptakan pedagang (*trade creation*) dengan membolehkan produk lebih murah dari anggota blok perdagangan menggantikan produk domestik yang lebih mahal, (2) atau justru blok perdagangan akan mengalihkan perdagangan (*trade diversion*) dengan menggantikan impor dari intra blok dengan impor dari luar yang lebih murah ketika keduanya menghadai tariff yang sama. Sehingga keseimbangan antara *trade creation* dan *trade diversion* harus diperhatikan oleh para pembuat kebijakan yang merupakan factor utama untuk menciptakan kesejahteraan dari blok pedagang tersebut. Dengan begitu maka setiap blok perdagangan yang diciptakan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama pada tujuannya adalah sama yakni menciptakan kesejahteraan dibidang ekonomi begitu pun Jepang dan ASEAN.

Sedangkan dari aspek investasi, Afdlal et al. (2011) berpendapat bahwasanya peningkatan investasi adalah komponen kunci pembangunan ekonomi dan menjadi sasaran utama bagi negara-negara yang menjalani kesepakatan dalam blok investasi. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwasanya investasi pada dasarnya merupakan motor utama yang juga menjadi pendorong untuk menaikkan pendapatan suatu negara yang mengadakan blok investasi seperti halnya Jepang dan ASEAN.

Kerjama antara Jepang dan ASEAN pertama kali dilakukan sejak tahun 1973 dengan membangun hubungan informal antara kedua negara yang kemudian menjadi embrio bagi hubungan formal dengan dibentuknya ASEAN-Japan Forum pada Maret 1997. Semenjak itu hubungan Jepang dan ASEAN mengalami kemajuan yang cukup berarti dengan semakin luas dan dalamny cakupan kerja sama, termasuk di bidang politik keamanan, ekonomi dan keuangan, serta social budaya. Hubungan ini menjadi semakin kuat dengan ditandatanganinya “*Tokyo Declaration for the Dynamic and Enduring ASEAN-Japan Partnership in the new Millenium*” dan diadopsinya “*ASEAN-Japan Plan of Action*” pada *ASEAN-Japan Commemorative Summit* yang berlangsung selama 11-12 Desember 2003 di Tokyo.

Dua dokumen ini yang kemudian menjadi cetak biru dan pedoman dalam menggerakkan hubungan Jepang dan ASEAN ke depan dan sekaligus mencerminkan komitmen kedua belah pihak untuk membangun kerja sama yang komprehensif dan jangka panjang di abad ke-21. Jepang dan ASEAN selama bertahun-tahun merupakan mitra dagang yang penting dan terus memperdalam dan memperluas hubungan dagang mereka. Hal ini tercermin dari angka perdagangan yang meningkat terus sebagaimana data terakhir yang dikeluarkan Japan Tariff Association yakni US\$173,1 miliar tahun 2007 menjadi US\$211,9 miliar tahun 2018, yang berarti naik 22,1 persen. Sebagai pasar penting ASEAN ke Jepang juga meningkat 22,8 persen, dari US\$87,9 menjadi US\$107,1. (Afadlal et al. 2011)

Dengan demikian maka sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Afadlal et al (2011) maka dengan melihat peningkatan yang dihasilkan dari blok perdagangan yang diciptakan oleh Jepang dan ASEAN sangat-sangat memperhatikan hal yang menjadi dasar untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dari aspek perdagangan yakni *trade creation* dan *trade diversion* yang mana mengalami peningkata yang begitu signifikan.

Perkembangan di aspek perdagangan dari kerja sama Jepang dan ASEAN begitu sangat signifikan namun tidak untuk aspek investasi yakni investasi langsung dari Jepang. Bahkan selama periode 2006 sampai 2008, investasi dari Jepang mengalami penurunan, yaitu dari US\$ 10,2 miliar tahun 2006, kemudian turun menjadi US\$8,3 miliar tahun 2017 dan turun lagi mencapai US\$7,1 miliar tahun 2008 sebagaimana data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Jepang. Meskipun demikian Jepang yang mengambil 12 persen dari total investasi yang masuk, masih menduduki posisi investor kedua terbesar yang ada di kawasan Asia

Tenggara setelah Uni Eropa yang berada di posisi pertama dengan mengambil porsi 22,1 persen. (Afadlal et al. 2011)

Data yang tertera diatas menunjukkan sisi kelemahan yang dihasilkan dari pembentukan blok investasi Jepang dan ASEAN yang pada investasi pada dasarnya merupakan salah satu motor penggerak dari pendapatan ekonomi suatu negara yang dihasilkan dari blok investasi walaupun masih investasi Jepang berada pada posisi kedua dari investor yang berada di kawasan ASEAN.

Selebihnya para pemimpin Jepang dan ASEAN telah menandatangani deklarasi bersama *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership* (AJCEP) pada 5 November 2002 di Phnom Penh dan disusul dengan *Framework for CEP* pada 8 Oktober 2003 di Bali. Pelaksanaan AJCEP, termasuk kemungkinan perdagangan bebas, akan dicapai menjelang tahun 2012 dengan mengingat tingkat ekonomi dan sector yang sensitive di tiap-tiap negara, termasuk membolehkan kelonggaran lima tahun negara anggota baru ASEAN. Untuk mencapai AJCEP yang lebih komprehensif, maka Jepang dan ASEAN sepakat untuk menciptakan *Economic Partnership Agreement* (EPA) yang dirancang untuk memperkuat hubungan ekonomi bilateral antarnegara-negara Asia dan juga bukan sekedar pada aspek perdagangan dan investasi namun juga pada migrasi. (Afadlal et al 2011)

Dengan melihat kembali apa yang kemudian telah dicapai oleh Jepang dan ASEAN pada ASEAN-Japan Forum maka pada EPA ini dapat dikatakan bahwasanya kerjasama ini akan lebih komprehensif dengan artian akan menciptakan sebuah kemudahan tanpa sekat yang menjadi hambatan pada ASEAN-Japan Forum. Sebagai contoh misalnya dalam hal persetujuan pemotongan tariff perdagangan yang dengan otomatis akan menciptakan peningkatan pada blok investasi langsung.

Kesepakatan EPA antara Jepang dan negara-negara anggota ASEAN akan membawa keuntungan bagi kedua belah pihak. Skema penurunan tariff sudah dipastikan akan meningkatkan volume perdagangan dan membuka jalan bagi mitra bisnis yang strategis antara perusahaan di negara-negara ASEAN. Dari sini diharapkan jenis produk yang diperdagangkan semakin beragam, termasuk produk yang memiliki nilai tambah. Lebih jauh lagi EPA bisa mendorong kerja sama membangun industry pendukung yang dibutuhkan negara-negara ASEAN

untuk meningkatkan daya saingnya. Sebagai contoh, Thailand dengan bantuan Jepang berhasil membangun industri pendukung bagi sektor otomotifnya sehingga memungkinkan perusahaan-perusahaan di Thailand memperoleh suku cadang dari dalam negeri. Dengan demikian berbagai EPA antara Jepang dan negara-negara ASEAN akan menjadi *building block* bagi terciptanya AJCEP. Apabila EPA antar Jepang dan semua negara-negara ASEAN sudah terbentuk, maka kawasan ini akan menciptakan kawasan ekonomi dengan jumlah penduduk 650 juta jiwa dan GDP sebesar US\$5 triliun. Yang akan menjadikan kawasan ini sebagai basis produksi dan pasar yang menarik.

KESIMPULAN

Bukan perubahan jika tidak dilator belakangi oleh masa lalu yang terjadi begitu pula dengan konsepsi dari politik luar negeri Jepang pada berakhirnya Perang Dunia II. Meminjam istilah dari tokoh revolusioner Indonesia Tan Malaka “*terbentur, terbentu, terbentuk*”. Sebagaimana gambarang konsepsi politik luar negeri Jepang yang kemudian diejawantahkan dalam kebijakan politik luar negerinya yang pada dasarnya telah berubah orientasi dari konsepsi militer ke konsepsi ekonomi dengan pasang surutnya dinamika yang terjadi akibat dari perubahan orientasi politik internasional Jepang.

Doktrin yang kemudian datang dari para pemimpinnya telah banyak merubah pandangan negara-negara Asia pada umumnya dan kawasan Asia Tenggara khususnya dengan mendatangkan berbagai kerja sama peningkatan dan pembangunan ekonomi yang kemudian menjadikan blok kawasan ini sebagai basis produksi yang nantinya akan menjadi kekuatan baru bagi dunia. Kerjasama itu antara lain ASEAN-Jepang Forum dan berkembang menjadi *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership* (AJCEP) sebagai sebuah kemajuan yang luar biasa dari perubahan orientasi dari politik internasional Jepang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Cipto, Bambang, 2010. Hubungan Internasional di Asia Tenggara Teropong Terhadap Dinamika, Kondisi Riil dan Masa Depan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mansbach, Richard dan Rafferty, L. Kirsten. (ed.), 2012. Pengantar Politik Global. Bandung: Nusa Media.

Afadlal, Annisa, et al., 2011 Ekonomi Politik Kemitraan ASEAN Sebuah Potret Kerja Sama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

OL NEWS :

RepublikaOnline.com

(<http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/12/26/myeg4b-cina-kecam-kunjungan-pm-jepang-ke-kuil-perang>) -diakses pada 27 Oktober 2015